



Judul : DPR : Usut Anggaran Kemenpora
Tanggal : Jumat, 02 Juni 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 11

DPR: Usut Anggaran Kemenpora

● BAMBANG NOROYONO

Kemenpora diminta memperbaiki pengelolaan anggaran.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong lembaga penegakan hukum mulai ambil bagian dalam pengawasan terakhir penggunaan keuangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Wakil Ketua di Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menyampaikan desakan tersebut setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan opini tak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer* atas penggunaan dan pengelolaan anggaran pada kementerian tersebut.

Sutan mengatakan, Komisi X memang belum menerima dan membaca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kemenpora. Namun, dalam paripurna legislator pekan lalu, kata dia,

BPK sudah memastikan Kemenpora bersama tujuh lembaga kementerian lainnya, dengan opini *disclaimer*. “Opini tidak memberikan pendapat dari BPK, tentu mengurangi kredibilitas kementerian tersebut,” ujar Sutan.

Apalagi, politikus dari Fraksi Gerindra itu menerangkan, *disclaimer* tersebut bukan yang pertama oleh Kemenpora. Pada 2016, BPK juga menilai Kemenpora sebagai salah satu kementerian dengan pertanggungjawaban keuangan terburuk sepanjang APBN 2015. “Kami mendesak Kemenpora agar memperbaiki pengelolaan anggarannya. Dan meminta penegak hukum, meneruskan apa temuan yang sudah disampaikan BPK,” ujarnya.

Menurut Sutan, status TMP Kemenpora tahun ini akan berdampak buruk. Terutama, dalam persiapan program tahun mendatang di kementerian tersebut. Yakni Asian Games 2018 dan turunannya, seperti Asian Paragames 2018 dan yang lain. Komisi X sulit menerima permintaan anggaran dari Kemenpora, jika opini *disclaimer* tersebut tak terve-

rifikasi.

“Yang kami (Komisi X) minta, jangan *disclaimer* ini, mengorbankan agenda Asian Games dan agenda-agenda tahun depan yang dananya sangat besar,” kata dia. Karena itu, Sutan menambahkan, Komisi X akan kembali memanggil Menpora Imam bersama perangkat Asian Games lainnya untuk memastikan penggunaan anggaran gelaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

Paripurna DPR, pekan lalu memberikan status tak memberikan pendapat atau *disclaimer* bagi Kemenpora. TMP tersebut, menjadi yang kedua kalinya. Pada 2016 lalu, BPK juga memberikan *disclaimer* atas penggunaan anggaran 2015. Tapi, *disclaimer* tahun ini, lebih buruk dari tahun sebelumnya, jika menengok jumlah temuan yang diberikan BPK di Kemenpora.

Tahun lalu, *disclaimer* Kemenpora oleh BPK sebanyak 31 temuan dengan besaran Rp 9,4 miliar. Dalam rilis resmi Kemenpora, pada Senin (29/5), Menpora Imam menyampaikan kepada Komisi X, nilai *disclaimer* 2017 atas peng-



gunaan anggaran 2016, ada sebanyak 16 temuan. Nilainya sebesar Rp 144 miliar. Dalam rilis Kemenpora yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (29/5), temuan BPK tersebut, disertai dengan 60 rekomendasi.

Nilai dari rekomendasi tersebut mencapai Rp 110 miliar dan rekomendasi kewajiban setoran ke kas negara sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan nilai rekomendasi yang harus dikaji ulang sebagai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp 90 miliar.

Namun, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot Dewa Broto menjelaskan, besaran temuan, tak sampai Rp 144 miliar. "Kurang dari nilai yang diberitakan sebelumnya. Tidak sebesar itu (Rp 144 miliar)," ujar dia saat dihubungi, pada Kamis (1/6).

Dia menjelaskan, Kemenpora juga belum tahu besaran pasti nilai temuan lembaga audit negara tersebut. Karena, sampai Rabu (31/5), Kemenpora belum menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Hanya, dia menegaskan, *dis-*

claimer tahun ini menyakitkan. Gatot mengatakan, itu lantaran, opini tersebut, didapat saat tahun pertamnya sebagai sekretaris di kementerian tersebut. "Ini seperti pil pahit," kata dia.

Ia mengungkapkan, memang ada dua program utama di kementeriannya yang membuat *claimer* kembali terulang. Pertama, penggunaan anggaran dalam pemberian fasilitas persiapan dan sosialisasi Asian Games 2018.

Namun, Gatot mengatakan, persoalan tersebut sudah terverifikasi. Baik dari internal Kemenpora sendiri dan Panitia Asian Games (Inasgoc) maupun dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Tapi keburu (duluan) *claimer* dari BPK yang muncul," ujar dia. Namun, Gatot mengaku tak ingat berapa besaran angka yang terverifikasi tersebut. "Nilainya kecil kok. Saya lupa. Tapi hanya beberapa," ujar Gatot.

Program lainnya, yakni gelaran pesta olahraga rekreasi internasional atau TAFISA 2016. Gatot mengungkapkan, anggaran gelaran tersebut tak kurang dari Rp 125 miliar. ■ **ed:** abdullah sammy